

BAB II

KIPRAH PBB DALAM PENEGAKAN HAM DAN PERDAMAIAN INTERNASIONAL

Setiap manusia memerlukan bantuan orang lain, karena itu manusia yang hidup memerlukan kerjasama, hidup berdampingan, dan hidup damai. Tetapi dalam mencapai tujuannya sering sekali terjadi benturan kepentingan. Seperti itu pula dengan negara, ingin bekerjasama dengan negara lain namun adakalanya benturan kepentingan tidak dapat dihindarkan.

Kenyataan dari benturan kepentingan dapat mengakibatkan perang, bahkan peperangan antar bangsa bisa saja terjadi. Setiap perang selalu menimbulkan dampak kehancuran, baik pihak yang dikatakan menang apalagi pihak yang mengalami kekalahan, bahkan banyak peristiwa perang mengakibatkan lenyapnya sebuah bangsa dan negara.

Upaya untuk menghindari perang yang dapat mengancam kehidupan manusia, diusahakan dengan membentuk suatu lembaga perdamaian yang merupakan persatuan seluruh bangsa atas dasar kehendak bebas negara masing-masing. Untuk bersama-sama meninjau dan menjamin keamanan dan ketertiban

A. Visi dan Misi PBB Mengenai HAM

PBB telah menyatakan didalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa kepercayaan mereka akan hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari pria maupun wanita, dan telah bertekad untuk menggalakan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik di dalam kemerdekaan yang lebih luas cakupannya, menimbang bahwa negara-negara anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi, dengan bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, menimbang bahwa pengertian umum tentang pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji ini, maka, Majelis Umum dengan ini memproklamasikan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk menggalakan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya secara universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari negara-negara anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka.⁹

⁹ www.un.org. "Mukhadimah deklarasi HAM". Diakses tanggal 13 february 2011

B. Kiprah PBB dalam HAM

Berdasarkan pada pengalaman dan kenyataan-kenyataan dari kehidupan internasional, memberi keyakinan bahwa ketentuan-ketentuan perdamaian dan keamanan akan merefleksi kepentingan-kepentingan khusus dari kekuatan-kekuatan utama dan akan didasarkan atas suatu kesadaran penuh mengenai pentingnya faktor kekuatan dalam hubungan-hubungan internasional. Hal ini kemudian menjadi dasar pembicaraan di Dumbarton dalam musim panas dan permulaan musim gugur tahun 1944. Dalam pembicaraan tersebut dinyatakan bahwa sangat perlu untuk membentuk suatu organisasi eksekutif dengan anggota terbatas yang nantinya akan dipercaya untuk mengemban kewajiban utama dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Dewan keamanan ini mempunyai fungsi secara terus-menerus dan mengambil keputusan secara tepat dan efektif. Sehingga PBB dapat berperan secara konsisten manakala terjadi pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Dengan bertolak pada pembicaraan di Dumberton, maka diputuskan untuk membentuk suatu organisasi eksekutif kecil yaitu Dewan Keamanan. Setelah pembicaraan di Dumberton Oaks, kemudian dilanjutkan pada konferensi Yalta. Pada konferensi ini telah mencapai persetujuan tentang prosedur pemungutan suara, masalah penggunaan veto dan susunan Dewan Keamanan. Dalam konferensi Yalta juga diputuskan bahwa tanggal 25 april-26 juni 1945 akan diadakan suatu muktamar PBB dengan bertempat di San Fransisco, dengan maksud untuk menyusun garis-garis besar yang telah ditentukan Oaks.

PBB yang merupakan sebuah organisasi yang mempunyai Tujuan :¹⁰

- a. Memelihara perdamaian dan keamanan
- b. Mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas asas-asas persamaan hak-hak dan penentuan nasib sendiri dari bangsa-bangsa, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang tepat guna memperkokoh perdamaian dunia
- c. Mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional yang bercorak ekonomi, sosial, kebudayaan atau kemanusiaan, dalam memajukan dan mendorong penghargaan terhadap hak-hak kebebasan manusia dari dan bagi semua orang tanpa membedakan bangsa, kelamin, bahasa atau agama.
- d. Menjadi pusat untuk menyerasikan tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan bersama.

Berangkat dari tujuan-tujuan tersebut, PBB sebenarnya merupakan sebuah organisasi yang kuat dalam pertahanan dan keamanan dunia. PBB juga mempunyai 6 organ penting yakni Majelis Umum (*General Assembly*), Dewan Keamanan, Dewan Sosial dan Ekonomi, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan sekretariat.

Dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki Dewan HAM yang merupakan merupakan organisasi penerus

¹⁰ T. Mav Rudy, Drs. SH, MIR, M.Sc. "Administrasi dan Organisasi Internasional". Bandung.

dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB di PBB. Dewan HAM PBB dibentuk melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 60/251 tanggal 15 Maret 2006. Dewan HAM merupakan *intergovernmental body* yang beranggotakan 47 negara dan merupakan badan subsider Majelis Umum PBB. Seiring dengan reformasi PBB yang ditegaskan pada *World Summit* tahun 2005 Dewan HAM dibentuk untuk menggantikan Komisi HAM PBB dan memperbaiki kerja organ PBB di bidang HAM dengan menghapus politisasi dan standar ganda di bidang HAM.

Dewan HAM PBB ini dibentuk untuk menegakan keadilan serta menangani pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara-negara anggota PBB yang dapat mengancam perdamaian dunia. Dewan HAM PBB bekerja sesuai dengan resolusi Majelis Umum tentang HAM.

PBB dalam menjaga perdamaian serta keamanan dunia kerap kali mengalami beberapa kendala. Dalam konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung lama, PBB cukup berperan dalam penyelesaian konflik tersebut, sampai suatu ketika pada saat tentara-tentara Israel menyerang Jalur Gaza dan menghilangkan nyawa warga sipil, serta anak-anak dan perempuan Palestina yang tidak berdosa. Israel telah dinyatakan bahwa melanggar HAM internasional karena menghilangkan nyawa warga sipil yang tak berdosa. Telah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh PBB dalam penyelesaian konflik tersebut. PBB banyak memberikan bantuan kepada korban-korban penyerangan tersebut, dan PBB juga membangun pemukiman untuk warga Palestina.

Kiprah PBB dalam penegakan Hak Asasi Manusia sangat lah dominan, karena PBB merupakan suatu lembaga yang sangat peduli akan Hak Asasi

Manusia. Karena Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.¹¹

C. Kiprah Dewan HAM dalam Penegakan HAM

Dewan HAM PBB merupakan organisasi penerus dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB di PBB. Dewan HAM PBB mempunyai arti penting dalam penegakan HAM dan Keadilan di dunia. Dewan HAM PBB juga merupakan lembaga sangat bergengsi dan sistem PBB dan merupakan satu-satunya badan PBB yang dimandatkan untuk melakukan pemajuan dan perlindungan HAM global. Selain itu, Dewan HAM juga dimandatkan untuk menyusun berbagai konvensi/hukum internasional di bidang HAM (*standard setting*). Berbeda dengan sebelumnya, Dewan HAM juga bertanggung jawab menyelenggarakan *Universal Periodic Review* (UPR) atau tinjauan periodik terhadap berbagai upaya dan pelaksanaan promosi dan perlindungan HAM di masing-masing negara anggota PBB.

Dewan HAM PBB yang telah dibentuk sejak 2006 lalu banyak menuai keberhasilan dalam hal penegakan HAM global. Dewan HAM PBB banyak menjalin kerjasama dengan kantor-kantor urusan penegakan HAM untuk regional. Dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh tentara-tentara Israel, Dewan HAM PBB telah banyak mengambil langkah-langkah guna menyelesaikan masalah tersebut. Meskipun upaya reformasi, Kantor Komisaris

¹¹ <http://kejahyatan.blogspot.com/> PBB memperjuangkan HAM diakses pada 17 April 2011

Tinggi Hak Asasi Manusia dan badan-badan hak asasi manusia PBB diawasi oleh Komisaris Tinggi terus menunjukkan bias bersejarah mereka terhadap Israel.

Pada bulan Maret 2006, PBB mendiskreditkan Komisi Hak Asasi Manusia, yang dikenal karena sejarahnya bias anti-Israel, digantikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia yang baru (HRC) sebagai bagian dari Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan program reformasi. Israel dan Amerika Serikat, di antara banyak negara-negara anggota lainnya, memberikan suara terhadap dewan baru mengutip kemampuan menyolok pelanggaran hak asasi manusia yang terpilih menjadi anggota dewan dan kegagalan untuk mendahului kritik kelembagaan lanjutan Israel.

Selama konflik Israel dengan Hizbullah pada Juli dan Agustus 2006, menunjukkan bahwa reorganisasi HRC telah berbuat banyak untuk mengurangi bias dari pendahulunya. HRC mengadopsi resolusi mengutuk aksi militer Israel di Libanon mengatakan apa-apa Hizbullah beralasan serangan terhadap Israel, penggunaan perisai manusia, dan pelanggaran terang-terangan dari Dewan Keamanan, Resolusi 1559 yang menyerukan perlucutan senjata grup.

Pada bulan November 2006, HRC disebut sesi ketiga khusus, di mana sekali lagi badan hak asasi manusia dipilih Israel sementara mengabaikan dunia s terburuk pelanggaran hak asasi manusia. Dewan berlalu resolusi yang didukung Arab mengecam Israel karena pendudukan di Dataran Tinggi Golan, kematian disengaja Palestina di Beit Hanoun di Gaza, dan Israel di pemukiman di Tepi Barat. Majelis Umum secara bersamaan mengesahkan resolusi mengutuk Israel sendiri untuk Beit Hanoun Dalam proses penargetan Israel. Dewan menolak

resolusi yang akan mengutuk rezim Khartoum untuk genosida di wilayah Darfur di Sudan.

Dewan terus memilih Israel untuk mengutuk dengan Presiden Dewan Luis Alfonso de Alba, Duta Besar Meksiko untuk PBB di Jenewa, mengusulkan pada bulan Juni 2007 bahwa Israel, dan Israel sendiri, menjadi bagian dari agenda permanen Dewan. Akibatnya, dan melanjutkan praktek dilembagakan dalam Komisi mendiskreditkan Hak Asasi Manusia, Negara Yahudi dipilih untuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam agenda tetap HRC di bawah Item 7, berjudul: situasi hak asasi manusia di Palestina dan lainnya yang diduduki Arab wilayah: Pelanggaran hak asasi manusia dan implikasi pendudukan Israel di Palestina dan wilayah Arab yang diduduki dan Hak untuk menentukan nasib sendiri rakyat Palestina. Israel adalah satu-satunya negara di dunia untuk muncul di agenda tetap HRC , sementara negara-negara seperti Cina dan Sudan, terkenal karena pelanggaran hak asasi manusia, termasuk sebagai bagian dari perdebatan umum.

Pada bulan Januari 2008, HRC mengadakan sidang khusus lain yang secara khusus berhubungan dengan Israel. Sesi keenam berjudul pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari serangan militer Israel di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk yang baru-baru ini di Gaza yang diduduki dan West Bank kota Nablus. Bias dari HRC juga terlihat dari laporan parsial yang dihasilkan oleh Pelapor dan sembilan resolusi satu sisi itu berlalu. Satu laporan khususnya keterlambatan oleh Pelapor Khusus John Dugard berjudul Hak Asasi Manusia

Situasi di Palestina dan Pendudukan Wilayah Arab tanggal 21 Januari 2008, pergi sejauh untuk membenarkan kekerasan teroris Palestina, menyalahkan Israel atas tindakan mereka dan membandingkan mereka ke Eropa yang menolak pendudukan Nazi, menyatakan bahwa tindakan teror terhadap pendudukan militer harus dilihat dalam konteks sejarah.

Pada bulan Maret 2008, sebagai hasil dari serangan roket harian yang ditembakkan dari Jalur Gaza ke kota-kota Israel, Israel memperketat pembatasan impor ke Gaza. Sebagai tanggapan, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia pada saat itu, Louise Arbour, mengecam Israel dan mendesak masyarakat internasional untuk menekan Israel untuk tidak memaksakan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza, sementara mengabaikan penderitaan yang dialami oleh Israel yang berhadapan dengan roket harian waduk di rumah mereka.

Penunjukan dari Richard Falk pada 2008 sebagai Pelapor Khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967 merupakan rendah baru untuk hubungan Israel dan menunjukkan bahwa kecenderungan bias HRC terhadap Israel masih jauh dari selesai. Falk, seorang kritikus terkenal Israel, telah membandingkan pengobatan Israel Palestina untuk Nazi selama Holocaust. Pada tahun 2009, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, Navanatham Pillay mensponsori Konferensi Durban II, dimaksudkan untuk menjadi sebuah tindak lanjut dari Konferensi Durban infamously anti-Semit pada

Pillay juga mengikuti pendahulunya nya dengan kritik terang-terangan dia Israel. Pada bulan November 2008, ia mengecam keras kebijakan Israel di Gaza, memberikan sedikit pengakuan kepada roket harian dan mematikan waduk warga sipil Israel dihadapkan dengan. Pillay terus meremehkan Israel selama negara operasi di Gaza, menyatakan bahwa ia sangat mengutuk penggunaan yang tidak proporsional Israel gaya mendesak para pemimpin Israel untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional, khususnya yang berkaitan dengan proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan militer dan pencegahan kolektif hukuman dan penargetan warga sipil.

Dewan HAM PBB sendiri juga mengeluarkan pendekatan bias dan laporan selama operasi Israel di Gaza, mengutuk "operasi militer Israel yang sedang berlangsung" dan menuntut Israel menghentikan menargetkan warga sipil dan fasilitas medis. "Untungnya, Dewan bias terhadap Israel telah dikutuk oleh Namun banyak pejabat internasional,. meskipun ini bias jelas, pemerintahan Obama memutuskan untuk bergabung dengan dewan pada bulan Maret 2009. Sementara kelompok yang merasa kecewa karena pilihan AS untuk berpartisipasi dalam suatu forum berprasangka, pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa mereka akan bekerja untuk reformasi Dewan dari dalam.

Peninjauan Dewan Hak Asasi Manusia itu harus terjadi pada tahun 2010 dan dilakukan oleh "Open-ended kelompok kerja antar pemerintah penelaahan terhadap pekerjaan dan fungsi Dewan Hak Asasi Manusia." Ini kelompok kerja akan bertemu dua kali selama satu minggu dari 25 ke 29. 2010 dan dari 17-21

Januari 2011 dan melaporkan tentang hasil tersebut pada sesi ke-17 (Juni 2011) Oktober.¹²

Kiprah Dewan HAM dalam penegakan HAM telah nyata di Israel, namun dalam penegakan HAM, Dewan HAM sering sekali terganjal oleh suara-suara dari negara-negara yang tidak mendukungnya dan itu bersifat suara negatif. Dalam melakukan penegakan HAM, Dewan HAM PBB biasanya membawa masalah tersebut ke meja persidangan.

Dalam kasus Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel berkali-kali, Dewan HAM telah membawa masalah tersebut ke meja persidangan Dewan HAM PBB. Dan dalam persidangan tersebut biasanya Dewan HAM PBB melakukannya dengan cara pemungutan suara atau voting. Namun kerap kali dalam pemungutan suara tersebut terdapat hasil yang tidak memuaskan, karena faktanya banyak sekali negara-negara besar yang juga merupakan anggota Dewan HAM PBB itu menolak suatu rancangan resolusi bagi negara yang telah melanggar HAM tersebut, dalam artian negara tersebut melakukan abstain ataupun menolak sekaligus.

¹²http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://www.adl.org/international/Israel_un_human.asp%3Fm_flipmode%3D8 Israel di PBB dan Dewan HAM diakses pada tanggal 18 April 2011

D. Masalah Pelanggaran HAM dan Penyelesaiannya di PBB

Pelanggaran HAM merupakan suatu yang sangat sering sekali terjadi, dan seharusnya dalam pelanggaran HAM baik orang ataupun negara mendapatkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Menurut sistem PBB, dalam upaya pemajuan dan peningkatan HAM dikenal tiga bidang utama yakni :

- a. Upaya pembekuan standar internasional
- b. Kegiatan monitoring/pemantauan pelaksanaan HAM
- c. Jasa nasehat dan kerjasama teknik

PBB melalui badan-badan bawahannya mempunyai peranan sentral dalam pembakuan standar dengan mengesahkan berbagai instrumen HAM. Kegiatan pemantauan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana negara-negara anggota PBB memajukan dan melindungi HAM berdasarkan standar yang telah ditetapkan PBB diatas. Dalam upaya ini, PBB memberikan jasa nasehatnya termasuk bantuan kerjasama teknik dalam bentuk seminar, pelatihan dan penanganan secara khusus beberapa kategori HAM. Dalam upaya pemantauan konvensi yang telah diratifikasi oleh negara, maka terdapat enam pemantau instrumen, yakni ¹³:

- a. Komite HAM : memantau hak-hak sipil dan politik
- b. Komite ekonomi dan Sosial Budaya : memantau pelaksanaan hak-hak tersebut

¹³ Boer Meurs 2000. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika*

- c. Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi : khusus memantau mengenai bentuk diskriminasi
- d. Komite Anti Penyiksaan : memantau pelaksanaan konveksi dan penyiksaan
- e. Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita : memantau diskriminasi wanita
- f. Komite Hak Anak : khusus memantau pelaksanaan Konvensi hak-hak anak.

Pasal 1 dan 2 Deklarasi PBB menegaskan bahwa semua orang dilahirkan oleh martabat dan hak-hak yang sama dan berhak atas semua hak dan kebebasan sebagaimana yang ditetapkan oleh Deklarasi tanpa membeda-bedakan baik dari segi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, maupun yang lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran, atau kedudukan yang lain. Sedangkan dalam pasal 3 sampai 21 Deklarasi tersebut menempatkan hak-hak sipil dan politik yang menjadikan hak semua orang. Hak-hak itu antara lain ¹⁴:

- a. Hak untuk hidup
- b. Kebebasan dan keamanan pribadi
- c. Bebas dari perbudakan dan penghambaan
- d. Kejam, tak berkrikemanusiaan ataupun yang merendahkan derajat kemanusiaan
- e. Hak untuk memperoleh pengakuan hukum dimana saja sebagai pribadi
- f. Hak untuk pengampunan hukum yang efektif

¹⁴ Boer Maupa Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika

- g. Bebas dari penangkapan, penahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang
- h. Hak untuk peradilan yang adil dan dengar pendapat yang dilakukan oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak
- i. Hak untuk praduga tak bersalah
- j. Bebas dari campur tangan sewenang-wenang terhadap keleluasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal maupun surat-surat
- k. Bebas dari serangan kehormatan dan nama baik
- l. Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu
- m. Bebas bergerak, hak untuk memperoleh suaka, hak atas suatu kebangsaan, hak untuk menikah dan membentuk keluarga, hak untuk mempunyai hak milik
- n. Bebas berfikir, berkesadaran dan beragama, dan menyatakan pendapat
- o. Hak untuk menghimpun dan berserikat, hak untuk ambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

PBB dapat menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang melakukan pelanggaran HAM menurut Bab VII Piagam dalam 3 hal¹⁵:

- a. Jika negara itu mengadakan tindakan-tindakan yang mengancam perdamaian
- b. Jika melanggar perdamaian
- c. Jika negara itu melancarkan suatu agresi terhadap negara lain.

¹⁵ Sumaryo Suryokusumo. 1997. *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*. Bandung. Hal 21

Tindakan yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional dapat dibedakan di dalam dua pengertian¹⁶:

- a. Pengertian pertama yaitu di dalam kerangka Pasal 34 Piagam dimana terjadi pertikaian antar negara yang berlanjut yang mungkin dapat mengancam perdamaian dan tidak akan diikuti dengan sanksi.
- b. Pengertian kedua adalah di dalam kerangka Bab VII Piagam yaitu menyangkut suatu tindakan yang dilakukan oleh sesuatu negara yang melanggar prinsip-prinsip PBB yang secara langsung dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional dan dapat dikenakan sanksi menurut Pasal 51 Piagam.

Ada beberapa masalah pelanggaran HAM yang mengancam perdamaian dunia yang telah dilakukan oleh Israel. Pada tanggal 27 Desember 2008 lalu Israel menyerang Jalur Gaza, selama agresi tersebut Israel banyak melanggar HAM berat yang dinilai masyarakat internasional patut untuk dihukum oleh PBB. Akhirnya pada hari jumat 9 januari 2009, melalui desakan dari para anggota, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No 1860 tentang situasi di Jalur Gaza yang bertujuan mewujudkan gencatan senjata segera di Gaza setelah dua pekan berperang.

Reaksi PBB atas agresi militer Israel ke Gaza adalah tindakan agresor Israel di Jalur Gaza merupakan ujian berat. Kredibilitas dan kewibawaan PBB sangat terancam karena organ PBB dinilai lamban dan terkesan dihegemoni oleh

kepentingan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Setelah adanya desakan dari berbagai negara dan organisasi internasional, maka Dewan HAM dan Dewan Keamanan PBB melakukan sidang dan mengeluarkan resolusi. Dewan HAM PBB menyepakati untuk menerima tentang Pelanggaran Berat HAM di wilayah pendudukan Palestina yang terkait dengan Serangan Militer di Pendudukan Jalur Gaza (*The Grave Violations of Human Rights in the Occupied Palestina Territory Particularly Due to the Recent Israeli Military attacks against the Occupaied Gaza*